

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital ini telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Pada saat ini, transformasi digital tidak hanya memengaruhi sektor swasta, namun sektor publik juga dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi. Menurut Tulungen et al. (2022), penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan suatu instansi, terutama dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu fondasi utama dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta menghadirkan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat (Saputri, 2025).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dituntut untuk mempercepat proses administrasi dan penyampaian informasi. Semakin maju teknologi informasi, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efisien Mirza et al. (2023). Salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas administrasi pemerintahan adalah pengelolaan arsip.

Pengelolaan arsip merupakan elemen krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Putra (2024), pengelolaan arsip

merupakan upaya dalam menangani dan mengatur dokumen - dokumen yang dimiliki suatu lembaga guna menunjang pelaksanaan kegiatan serta pencapaian tujuan organisasi. Arsip berfungsi sebagai sumber informasi, memori organisasi, serta dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan arsip di berbagai lembaga pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, seperti penumpukan dokumen fisik, keterbatasan ruang penyimpanan, serta kesulitan dalam menemukan arsip secara cepat dan tepat. Kondisi ini berpotensi menghambat efisiensi operasional dan meningkatkan risiko kehilangan data penting yang seharusnya mendukung akuntabilitas lembaga.

Kondisi serupa juga terjadi sebelum diterapkannya sistem digital di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang. Pengelolaan arsip dilakukan secara manual, dimana setiap surat masuk dan surat keluar akan dicatat didalam buku agenda, sedangkan dokumen disimpan secara fisik dalam folder atau rak arsip. Sistem manual tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti lambatnya proses penemuan arsip, risiko kerusakan atau kehilangan dokumen, penumpukan berkas, serta keterbatasan ruang penyimpanan. Selain itu, proses administrasi membutuhkan waktu lebih lama karena dokumen harus melalui beberapa tahapan pencatatan sebelum diteruskan kepada pihak yang bersangkutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat menetapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan ini mendorong integrasi sistem administrasi pemerintahan secara digital. Sebagai bagian dari implementasi SPBE, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun

2020 meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Menurut Azzahra et al. (2025) aplikasi SRIKANDI dirancang untuk memfasilitasi pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan arsip dinamis secara elektronik sehingga mampu mendukung efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong penerapan pemerintahan tanpa kertas (*paperless*).

Secara konseptual, implementasi aplikasi SRIKANDI menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola arsip yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan instansi pemerintahan. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi dokumen, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta menjaga keberlangsungan memori organisasi secara terintegrasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Januari 2023 Kantor BAPPEDA Kota Padang mulai mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan surat menyurat di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan nota dinas, pendisposisian surat masuk dan surat keluar, hingga pengelolaan berbagai dokumen kegiatan.

Penggunaan arsip digital memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari berkas informasi yang telah tersimpan sehingga mendukung kelancaran pekerjaan (Fikri, 2025). Sistem yang terintegrasi melalui aplikasi SRIKANDI memungkinkan pegawai mengakses surat dinas elektronik secara lebih cepat dan sistematis. Dengan demikian, proses administrasi dapat berlangsung lebih efisien dan transparan. Transisi dari sistem manual ke sistem digital ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola arsip di lingkungan BAPPEDA Kota Padang.

Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan (Litbang). Setiap kegiatan tersebut menghasilkan berbagai dokumen penting, seperti laporan kajian, hasil musrenbang, rakorbang, serta dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan. Dokumen - dokumen ini memerlukan sistem pengelolaan arsip yang baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks tersebut, penerapan aplikasi SRIKANDI menjadi sangat relevan bagi BAPPEDA Kota Padang. Sistem kearsipan elektronik memungkinkan dokumen perencanaan dan data pembangunan tersimpan lebih aman, mudah ditelusuri, serta terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian, keberlanjutan memori organisasi dapat terjaga dan dokumen yang dihasilkan tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali untuk analisis dan evaluasi pembangunan daerah.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi SRIKANDI di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Kantor BAPPEDA Kota Padang masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, ketidaksesuaian dalam penginputan data, serta resistensi sebagian pegawai yang masih terbiasa dengan sistem manual (Azizah & Rajab, 2025)

Kendala-kendala tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan arsip dan menimbulkan ketidakteraturan administrasi. Selain itu, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang

mendorong digitalisasi melalui SPBE dan realisasi implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk dapat memahami sejauh mana penerapan aplikasi SRIKANDI mampu mendukung pengelolaan arsip secara optimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI DALAM PENGELOLAAN ARSIP DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG”**. Dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi sistem kearsipan elektronik serta mendukung peningkatan pengelolaan arsip yang sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang ?
2. Apa saja kendala penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang ?
3. Bagaimana solusi dari kendala penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

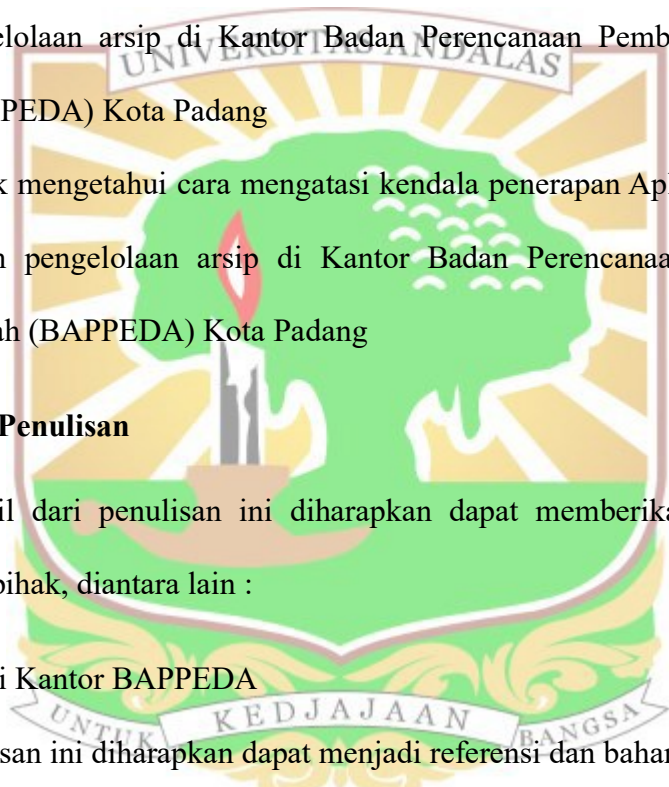
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan penulisan ini antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang

### 1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantara lain :

1. Bagi Kantor BAPPEDA  
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan dalam memahami serta mengoptimalkan penerapan Aplikasi Srikandi sebagai inovasi pengelolaan arsip. Selain itu, hasil penulisan ini juga dapat memperluas wawasan mengenai pentingnya transformasi digital dalam kearsipan guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, tertib, dan transparan.



2. Bagi Universitas

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi akademik bagi universitas, khususnya dalam mata kuliah atau program studi yang membahas manajemen informasi, teknologi informasi, dan kearsipan digital. Dengan adanya temuan dari implementasi Aplikasi Srikandi, universitas dapat memperkaya materi perkuliahan, memberikan contoh praktik nyata bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Penulisan ini memberikan manfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan pengalaman terkait implementasi Aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsip. Selain itu, kegiatan ini melatih penulis untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam menghadapi dunia kerja.

### 1.5 Metode Penulisan

Berdasarkan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018), Maka dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai informasi yang relevan dengan objek diamati.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini

bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 3. Studi Kepustakaan

Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari bahan terkait dengan topik yang diangkat, melalui referensi, membaca, dan mengutip dari sumber berupa buku, jurnal, maupun bahan bacaan lainnya.

## 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Magang dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang, Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Kel. Aie Pacah, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Dengan penempatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). Pemilihan instansi disesuaikan dengan topik “Penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam Pengelolaan Arsip”. Kegiatan magang berlangsung selama 40 hari kerja pada bulan Januari – Maret 2026.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memastikan fokus pembahasan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan, penulis menyusun laporan dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan

## **BAB II      LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan objek penelitian penulis mengenai arsip dan Aplikasi SRIKANDI yang meliputi pengertian, fungsi, tujuan, jenis, serta indikatornya.

## **BAB III     GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari instansi tempat magang yaitu Kantor Bappeda Kota Padang. Berisikan tentang profil instansi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

## **BAB IV     PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh melalui Observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dengan menyajikan fakta yang relevan serta menjadi jawaban atas rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dan analisis selama kegiatan magang terkait dengan Penerapan Aplikasi dalam Pengelolaan Arsip pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang.

